Lingkar Ekonomika, Vol. 2, No. 2, Oktober, pp. 1 – 7

LINGKAR EKONOMIKA

Available at: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jle/index

Analisis Pengaruh Pertumbuhan, Aglomerasi, PAD dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Pada Kabupaten/Kota di Yogyakarta Tahun 2011-2022

Zeni Nugi Aryani[1*], Abdul Aziz Ahmad[1], Diah Setyorini Gunawan[1]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

**Corresponding Author*: zeniaryani@gmail.com

Article Information

History of Article:
Received: September 6th 2023
Accepted: September 20th 2023
Published: October 20th 2023

Keywords:
income inequality, per capita growth, agglomeration, local own-source revenue, investment

Abstract

Income inequality between regions occurs because there are differences in the development process and differences in policies for each region. Income inequality between regions occurs in Yogyakarta, which is the province with the highest poverty rate in Java. One of the causes of poverty in Yogyakarta is inequality in the north and south sides. Development on the north side is progressing massively while development on the south side is relatively lagging behind. The purpose of this research is to analyze the effect and elasticity of per capita growth, agglomeration, local own-source revenue, and investment on income inequality between regions. This research is a quantitative research using secondary data. The data used in this research are inequality based on the Bonet index, GRDP (Gross Regional Domestic Product) per capita, agglomeration, local own-source revenue, and investment from 5 regencies/cities in Yogyakarta from 2011 to 2022. The data were obtained from BPS (Badan Pusat Statistik) *Yogyakarta publications and DJPK* (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) *publications. Data were analyzed using panel data analysis with the fixed effect model. The results showed that per capita growth has a positive and significant effect on income inequality between regions, agglomeration has a positive and significant effect on income inequality between regions, local own-source revenue has a negative and significant effect on income inequality between regions, and investment has a negative and significant effect on income inequality between regions. Based on this research, it is hoped that local governments can increase economic growth and make investment equitable, especially in the southern region by considering the potential of the area they have.*

History of Article:
Diterima: 6 September 2023
Disetujui: 20 September 2023
Dipublikasikan: 20 Oktober 2023

Kata Kunci:
ketimpangan, pertumbuhan per kapita, aglomerasi, PAD, investasi

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketimpangan berdasarkan indeks Bonet, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita, aglomerasi, pendapatan asli daerah, dan investasi dari 5 kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta selama tahun 2011 hingga tahun 2022. Data diperoleh dari publikasi BPS Yogyakarta dan publikasi DJPK. Data diolah menggunakan analisis data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, aglomerasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan investasi khususnya di wilayah selatan dengan mempertimbangkan potensi lokal yang dimiliki.

© 2023 Universitas Jenderal Soedirman

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan akan mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan ini terlihat dari adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan pendapatan antar wilayah memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memberikan dorongan kepada wilayah yang terbelakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar penduduknya merasa sejahtera. Namun demikian, terdapat dampak negatif yaitu stabilitas sosial melemah, menciptakan ketidakadilan, serta perekonomian menjadi tidak efisien.

Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia menghadapi tantangan berupa ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan ini terjadi karena terdapat perbedaan baik dalam proses pembangunan maupun kebijakan yang diambil tiap wilayah. Ketimpangan juga terjadi di Yogyakarta yang merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa (BPS DIY, 2023a). Kemiskinan di Yogyakarta terjadi karena perbedaan pembangunan di wilayah bagian utara dan bagian selatan. Pembangunan di wilayah utara dilakukan secara masif sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi, sedangkan pembangunan di wilayah selatan cukup lambat yang mengakibatkan pertumbuhan ekonominya rendah dan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah di bagian utara.

Ketimpangan antar wilayah dapat dilihat melalui tipologi daerah. Menurut Kuncoro (2004) tipologi daerah merupakan gambaran dan pola struktur pertumbuhan setiap wilayah

yang merepresentasikan kesejahteraan penduduk berdasarkan 2 indikator yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Tabel 1. Tipologi Daerah Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Posisi Perekonomian		Klasifikasi
	Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata PDRB/kapita	
Bantul	4,57%	Rp 16.574.314	Relatif tertinggal
Gunungkidul	4,42%	Rp 16.149.427	Relatif tertinggal
Kulon Progo	5,27%	Rp 16.465.601	Berkembang cepat
Sleman	4,79%	Rp 24.857.263	Cepat maju cepat tumbuh
Yogyakarta	4,69%	Rp 56.101.341	Maju tapi tertekan
DIY	4,47%	Rp 23.541.494	

Sumber: BPS, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa terdapat dua wilayah yang relatif tertinggal yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Satu wilayah termasuk berkembang cepat yaitu Kabupaten Kulon Progo, satu wilayah yang cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kabupaten Sleman, dan satu wilayah yang maju tapi tertekan yaitu Kota Yogyakarta.

Kaitan antara pertubuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sudah dijelaskan oleh Simon Kuznets melalui observasinya yaitu kurva U terbalik. Kuznets dalam Todaro & Smith (2011) menyatakan jika pada tahap awal pertumbuhan akan membuat ketimpangan semakin memburuk karena perubahan struktural yang dikonsentrasikan pada sektor industri modern. Ketimpangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian awalnya akan melebar secara cepat sebelum akhirnya kembali menyempit. Namun demikian, pada suatu saat ketimpangan akan kembali meningkat. Kurva U terbalik diciptakan oleh proses pertumbuhan yang berkelanjutan yang memperluas sektor modern saat sebuah wilayah bertransisi dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah dapat terjadi karena terdapat aglomerasi atau pemusatan kegiatan ekonomi. Aglomerasi merupakan indikator berkembangnya industri manufaktur di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008) tingkat aglomerasi yang tinggi akan mendorong proses pembangunan daerah, namun daerah yang memiliki tingkat aglomerasi yang rendah akan semakin terbelakang. Aglomerasi menyebabkan persebaran sumber daya antar wilayah menjadi tidak merata sehingga timbul ketimpangan. Aglomerasi memengaruhi ketimpangan antar wilayah ketika terdapat hambatan dalam mobilitas tenaga kerja antar wilayah atau ketika terjadi surplus tenaga kerja dalam perekonomian (Bonet, 2006).

Ketimpangan antar wilayah yang terjadi sebelum adanya otonomi daerah disebabkan karena sentralisasi pembangunan yang membuat proses pembangunan menjadi kurang efisien. Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah didukung dengan adanya desentralisasi yang salah satunya mengatur sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah menandakan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya (Kuncoro, 2003). Namun demikian, setiap daerah memiliki perbedaan pendapatan asli daerah yang diperoleh. Hal tersebut akan menciptakan ketimpangan karena proses pembangunan di setiap daerah berbeda.

Investasi merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi di masa yang akan datang. Harrod-Domar dalam teorinya menyatakan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif, artinya ketika investasi di suatu wilayah rendah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita wilayah tersebut menjadi rendah karena kekurangan kegiatan produktif. Namun demikian, investasi dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan ketika investasi hanya berpusat di beberapa wilayah (Adipuryanti & Sudibia, 2015).

METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan berdasarkan indeks Bonet, pendapatan per kapita, aglomerasi, pendapatan asli daerah, dan investasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS Yogyakarta dan publikasi DJPK. Data yang digunakan merupakan data panel atau gabungan data penampang silang dan deret waktu dari lima kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2022. Analisis data dari penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data panel dengan model *fixed effect* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Fixed Effect Model (FEM) Data observasi: 59			
Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
C	-0,0105	-2,9695	0,0046
D_PK?	0,0393	25,4770	0,0000
D_AGL?	0,3274	2,6496	0,0108
D_PAD?	-0,0001	-3,3494	0,0015
D_INV?	-0,0818	-12,6453	0,0000
R-squared	0,9833		
F-statistic	367,5407		
Prob(F-statistic)	0,0000		

Sumber: Eviews 10, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diketahui koefisien masing-masing variabel. Pertumbuhan per kapita memiliki koefisien sebesar 0,0393 artinya jika terjadi kenaikan perubahan pertumbuhan per kapita sebesar 1 persen maka ketimpangan dengan indeks Bonet akan meningkat sebesar 0,0393. Selanjutnya, koefisien aglomerasi sebesar 0,3274 yang berarti jika perubahan aglomerasi meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan dengan indeks Bonet akan meningkat sebesar 0,3274. Pendapatan asli daerah memiliki koefisien sebesar -0,0001 artinya jika terjadi kenaikan perubahan pendapatan asli daerah maka ketimpangan dengan indeks Bonet akan menurun sebesar 0,0001. Terakhir, koefisien dari investasi adalah -0,0818 yang berarti jika terjadi kenaikan perubahan investasi sebesar 1 persen maka ketimpangan dengan indeks Bonet akan menurun sebesar 0,0818.

Diketahui R-squared pada Tabel 2 sebesar 0,9833 yang artinya variabel bebas yaitu pertumbuhan per kapita, aglomerasi, PAD, dan investasi dapat menjelaskan ketimpangan pendapatan antar wilayah sebesar 98,3 persen. Nilai F statistik dari hasil regresi yaitu 367,5407 sedangkan nilai F tabelnya yaitu 2,54. Sehingga dapat disimpulkan jika F statistik lebih besar dari F tabel yang artinya variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya pada Tabel 2 tertera nilai p-value masing-masing variabel, nilai p-value kurang dari 0,05 artinya variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, aglomerasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Pertumbuhan per kapita di DI Yogyakarta berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Danawati et al. (2016), Harun & Maski (2013), dan Istiqamah et al. (2018). Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Anis (2022), Kunenengan et al. (2023), dan Yusica et al. (2018) yang menyatakan pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam penelitian ini pertumbuhan tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah karena pertumbuhan ekonomi didominasi oleh wilayah bagian utara yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan wilayah bagian selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah padahal luas wilayahnya hampir 60 persen dari luas total Provinsi DI Yogyakarta.

Aglomerasi di DI Yogyakarta berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Sugiyanto (2013), Muslimah & Putri (2021), dan Syamsir & Rahman (2018). Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai penelitian dari Anshori (2021), Damayanti (2017), dan Hendarmin (2019) yang menyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin tinggi aglomerasi suatu wilayah maka pembangunan di wilayah tersebut akan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah lain. Perbedaan tingkat aglomerasi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Industri pengolahan di DI Yogyakarta terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul memiliki industri pengolahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah tersebut. Selain itu, skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Pulau Jawa.

PAD di Yogyakarta berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamiel et al. (2022), Munandar & Khoirudin (2021), dan Nurhuda et al. (2013). Indikator desentralisasi fiskal yaitu rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan daerah kabupaten/kota di DI Yogyakarta masih didominasi oleh pendapatan transfer, kemudian diikuti oleh PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Artinya daerah belum mandiri dalam membiayai pembangunannya karena masih mengandalkan pendapatan transfer. Pajak daerah merupakan kontributor utama dalam peningkatan PAD selama enam tahun terakhir. Selain itu, pendapatan daerah Sebagian besar dialokasikan untuk sektor pendidikan, sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perekonomian.

Investasi di DI Yogyakarta berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Alfurqani et al.

(2021), Hartini (2017), dan Kiton (2019). Peningkatan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terdapat kegiatan-kegiatan produktif. Realisasi investasi di DI Yogyakarta cenderung naik setiap tahunnya meskipun masih terdapat ketimpangan dalam persebarannya. Selanjutnya, kenaikan investasi tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,23 persen khususnya di Kabupaten Kulon Progo karena terdapat proyek bandara internasional dan infrastruktur penunjang lainnya.

Elastisitas dari variabel yang sesuai hipotesis yaitu berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah sebesar -0,0785 untuk PAD dan -0,2875 untuk investasi. Yang berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1 persen maka ketimpangan akan berpotensi turun sebesar 0,0785 persen. Selanjutnya, setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen maka ketimpangan akan berpotensi turun sebesar 0,2873 persen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, aglomerasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dengan elastisitas dari variabel yang sesuai hipotesis yaitu pendapatan asli daerah dan investasi masing-masing adalah -0,0785 dan -0,2875.

Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan yaitu pemerintah daerah perlu mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru yang berbasis potensi lokal khususnya di wilayah selatan yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Potensi yang ada di wilayah selatan antara lain adalah perikanan, produksi garam, dan pariwisata. Selanjutnya pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dengan mengupayakan iklim yang kondusif, terlebih lagi saat ini sudah ada infrastruktur seperti bandara internasional. Persebaran investasi juga perlu diratakan, bukan hanya terpusat di wilayah utara. Investasi baik modal, teknologi, maupun sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, output produksi, dan kualitas produk khususnya bagi industri pengolahan pertanian di wilayah selatan yang nilai PDRB industrinya relatif rendah. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah selain dari pajak, contohnya yaitu dengan pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD).

DAFTAR PUSTAKA

Akbar dkk. (2018). *Penerapan Format Akuntansi Sederhana pada Toko Kelontong*. Seminar Nasional Hasil PKM, 1, 1.

Amstrong, Gary & Philip, Kotler. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.

Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. 2019. *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto. (2011). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Sunyoto, Suyanto. (2011). *Analisis Regresi untuk Uji Hipotesis*, Yogyakarta : Caps.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Utami, Christina Whidya. (2012), *Manajemen Ritel*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.